



**STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
KENDAL DALAM UPAYA MENINGKATKAN INVESTASI
DAERAH**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Mohammad Misbakhul Munir

NIM 7111410049

**JURUSAN EKONOMI PEMBAGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Ujian Skripsi pada :

Hari : Kamis .

Tanggal : 18 Desember 2014

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Ekonomi Pembangunan



Lestya Karolina br Sebayang, S.E., M.si
NIP. 198007172008012016

Pembimbing

Prof. Dr. Ety Soesilowati, M.Si
NIP 196304181989012001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan didepan Sidang Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis

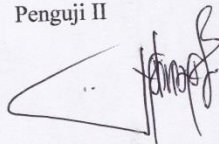
Tanggal : 8 Januari 2015

Penguji I



Dr. P. Eko Prasetyo. M.Si
NIP.196801022002121003

Penguji II



Dyah Maya Nihayah. S.E., M.Si
NIP. 197705022008122001

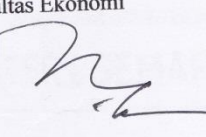
Penguji III



Prof. Dr. Etty Soesilowati. M.Si
NIP. 196304181989012001



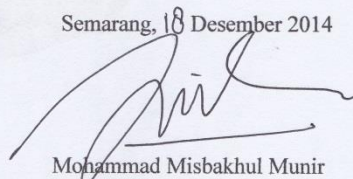
Mengetahui,
Rektor Fakultas Ekonomi


Dr. Martono. M.Si
NIP. 196603081989011001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi saya yang berjudul “Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kendal Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Daerah” adalah benar-benar hasil karya sendiri. Bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 18 Desember 2014



Mohammad Misbakhul Munir

NIM. 7111410049

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Ilmu adalah harta yang tak akan pernah ada habisnya. (Penulis)
- *“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azabku sangat berat.”* (QS 14 Ibrahim ayat 7)
- Jangan pernah berharap untuk berlari, jika untuk berdiri dikaki sendiri saja tidak mampu. (Penulis)

PERSEMBAHAN

- Allah SWT
- Ibunda Nur Khasanah yang memberikan motivasi dan senantiasa mendoakan setiap langkah saya tanpa henti
- Prof. Dr. Ety Soesilowati, M.Si yang selalu memberikan bimbingan dan wawasan baru.
- Kakakku yang selalu membimbing
- Sahabat-sahabat yang hadir dikala suka dan duka
- Guru dan dosen yang selalu mencurahkan ilmunya
- Almamater.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kendal Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Daerah”.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. S. Martono, M.Si. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kelancaran dalam perizinan penelitian.
3. Lesta Karolina Br Sebayang, SE. M.Si. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin untuk penelitian.

4. Prof. Dr. Ety Soesilowaty, M.Si. Dosen pembimbing yang sudah dengan tulus ikhlas meluangkan waktu, memberikan masukan dan arahan mulai tahap persiapan proposal hingga terwujudnya skripsi ini.
5. Ibunda Nur Khasanah yang telah banyak berjuang demi masa depan penulis, memberikan motivasi, dorongan dan selalu mendoakan.
6. Kakakku Ifah Nur Sichah, Nur Afidah, Iin Nur Zakiyah yang selalu membimbing dan memberikan arahan selama kuliah serta keluarga besar di Kendal.
7. Sahabat Ceriwis Ali Arto, Joko Budianto, Winda Cahyanngsih, Nely Aulia, Retno Hartanti, Desi Ambarita, dan teman-teman Ekonomi Pembangunan Angkatan 2010 yang sama-sama berjuang menyelesaikan studi ini.
8. Teman-teman kost Kosong yang telah memberi warna dalam kehidupan, memberi semangat, nasehat, cerita, dan canda tawa. Semoga kebersamaan dan tali silaturahmi kita tidak akan pernah putus.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, jika ada kritik dan saran yang membangun demi lebih menyempurnakan skripsi ini akan penulis terima. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, Desember 2014

Penulis

SARI

Mohammad Misbakhul Munir, 2014. “Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kendal Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Daerah”. Skripsi. Pembimbing Prof. Dr. Etty Soesilowati. M.Si.

Kata Kunci: Faktor Penentu Daya Tarik Investasi, Kawasan Industri, Strategi Pengembangan

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menjadi penentu daya tarik investasi dan merumuskan strategi untuk mengembangkan kawasan industri. Metode analisis yang digunakan adalah *Analytical Hierarchy Proses* (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi iklim investasi di kawasan industri Kendal dalam keadaan belum normal. Dalam keadaan normal seharusnya faktor utama penentu daya tarik investasi di kawasan industri Kendal adalah variabel ekonomi daerah, variabel tenaga kerja dan variabel infrastruktur, bukan variabel kelembagaan dan variabel sosial politik. Faktor yang menjadi penentu daya tarik investasi di kawasan industri Kendal yang paling dominan adalah variabel kelembagaan 28%, diikuti variabel sosial politik 25.9%, variabel infrastruktur 22.1%, variabel tenaga kerja 15% dan terakhir variabel ekonomi daerah 8.9%.

Strategi yang pertama yaitu memprioritaskan perbaikan variabel kelembagaan, kemudian yang kedua yaitu memperbaiki variabel sosial politik. Setelah keduanya normal, selanjutnya yang ketiga memperbaiki variabel infrastruktur fisik yang meliputi ketersediaan infrastruktur fisik dan kualitas infrastruktur, Keempat memperbaiki variabel tenaga kerja yang meliputi biaya tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja. Kelima yaitu memperbaiki variabel ekonomi daerah yang meliputi potensi ekonomi dan struktur ekonomi daerah.

ABSTRACT

Mohammad Misbakhul Munir, 2014. "Kendal Industrial Area Development Strategy to Increase Investment In Region". Thesis. The Department of Economic Development. Faculty of Economics State University of Semarang Supervisor Prof. Dr. Etty Soesilowati. M.Si.

Keywords: *Determinants of Investment Attractiveness, Industrial Area, Strategy Developmen*

The purpose of this study is to determine the factors that are determining the attractiveness of investment and formulate a strategy for developing industrial area. The analytical method used is Analytical Hierarchy Process (AHP). The results showed that the investment climate condition in the industrial area of Kendal has not been normal. In normal circumstances should be the main factor determining the attractiveness of investment in the industrial area of Kendal is the regional economic variable, variable of labor and infrastructure variable, instead of institutional variable and socio-political variable. Factors which also determines the attractiveness of investment in the industrial area of Kendal is the most dominant variable of institutional 28%, political and social variable followed by 25.9%, infrastructure variable 22.1, variable of labor 15% and the latter 8.9% of regional economic variable.

The first strategy is prioritizing improvements institutional variable. Then, the second is improving sosial political variable. After both normal, the third is improving infrastructure variable, which as the availability of physical infrastructure and quality of infrastructure, the fourth improve labor variable which include labor cost, availability of labor and labor productivity, The fifth is to improve local economic variable which include the potential economic and regional economic structure.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
SARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Konsep Otonomi Daerah	9
2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Investasi	10
2.1.3 Hubungan Antara Investasi Dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	13
2.1.4 Faktor Penentu Daya Tarik Investasi	14
2.1.5 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	17
2.1.6 Kawasan Industri	17
2.1.7 Tujuan Pembangunan Kawasan Industri	18
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Kerangka Berpikir	22

BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Populasi.....	25
3.3 Sampel.....	25
3.4 Jenis Sumber Data.....	26
3.5 Variabel Penelitian.....	27
3.6 Definisi Operasional.....	27
3.7 Metode Pengumpulan Data.....	29
3.7.1 Kuesioner.....	29
3.7.2 Wawancara.....	30
3.7.3 Dokumentasi.....	30
3.8 Metode Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Hasil Penelitian.....	34
4.1.1 Gambaran Umum Kawasan Industri Kendal.....	34
4.1.2 Profil Potensi Kawasan Industri Kendal.....	35
4.1.2.1 Dukungan Infrastruktur.....	36
4.1.2.2 Dukungan Birokrasi Kelembagaan.....	38
4.1.2.3 Dukungan Tenaga Kerja.....	40
4.1.3 Faktor Penentu Daya Tarik Investasi Di Kawasan Industri Kendal.....	41
4.2 Pembahasan.....	46
4.2.1 Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kendal Dalam Upaya Meningkatkan Investasi daerah.....	46
4.2.2 Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kawasan Industri Kendal Untuk Meningkatkan Investasi Daerah.....	53
BAB V PENUTUP.....	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Keunggulan Kawasan Industri Kendal.....	36
4.2 Data Pelabuhan Tanjung Kendal.....	37
4.3 Jenis Perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu Kabupaten Kendal	39
4.4 Data Pencari Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal	40
4.5 Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Kendal	41
4.6 Bobot Variabel dan Indikator Faktor Penentu Daya tarik Investasi di Kawasan Industri Kendal	43
4.7 Pemeringkatan Rangkaing Bobot Penentu Daya Tarik Investasi Dari Variabel Kelembagaan	44
4.8 Pemeringkatan Bobot Rangkaing Penentu Daya Tarik Investasi Dari Variabel Sosial Politik.....	44
4.9 Pemeringkatan Bobot Rangkaing Penentu Daya Tarik Investasi Dari Variabel Infrastruktur	45
4.10 Pemeringkatan Bobot Rangkaing Penentu Daya Tarik Investasi Dari Variabel Tenaga Kerja	45
4.11 Pemeringkatan Bobot Rangkaing Penentu Daya Tarik Investasi Dari Variabel Ekonomi Daerah.....	46

DAFTAR GAMBAR

Tabel		Halaman
2.1	Keunggulan Kawasan Industri Kendal.....	23
4.1	Data Pelabuhan Tanjung Kendal.....	34
4.2	Tingkat Level Penentu Daya tarik Investasi di Kawasan Industri Kendal.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Instumen Wawancara	61
2. Instrumen Kuesioner	64
3. Daftar Responden	75
4. Tabulasi Hasil Penelitian	76
5. Surat Perizinan Penelitian	79
6. Foto Penelitian.....	80

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pemberian wewenang yang luas kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemberian wewenang yang luas terhadap daerah otonom diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhususan, keistimewaan serta potensi keaneka ragaman dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di era otonomi dan globalisasi semakin dirasakan perlunya kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap serta menjunjung tinggi supremasi hukum, yaitu suatu kondisi dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman tertib dan teratur sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam acuan dasar setiap daerah harus membentuk suatu paket otonomi yang konsisten dengan kapasitas dan kebutuhannya. Dalam negara besar seperti Indonesia yang memiliki begitu banyak suku, ras, dan kebudayaan, satu ukuran belum tentu cocok untuk semua. Melihat hal demikian, perlunya pemerintah daerah

melibatkan semua elemen yang ada, termasuk DPRD untuk menjamin proses berjalannya desentralisasi secara baik dan bertanggung jawab.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, investasi daerah merupakan salah satu kekuatan penting untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Namun untuk merangsang investasi dibutuhkan agenda-agenda yang jelas dan komprehensif yang secara internal dikreasikan sendiri oleh pemerintah daerah. Agenda-agenda yang dimaksud antara lain: merumuskan kebijakan investasi, memperbaiki peraturan dan regulasi, memperbaiki dukungan dan pelayanan birokrasi, mengembangkan promosi daerah, mengembangkan kemitraan, mengembangkan *regional management*, mengembangkan *business networking*, mempertajam strategi belanja publik.

Secara normatif, investasi daerah (*local investment*) dipahami sebagai salah satu kekuatan penting untuk mengakselerasikan pembangunan daerah. Tak terkecuali di kalangan pemerintah daerah, timbul semacam kesadaran-kesadaran terlebih sesudah implementasi desentralisasi dan otonomi daerah bahwa akselerasi pembangunan hanya dimungkinkan jika terdapat arus investasi yang signifikan. Persepsi yang kuat tentang pentingnya investasi telah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan berbagai upaya, mulai dari promosi investasi yang gencar hingga kunjungan pejabat daerah keluar negeri.

Untuk meningkatkan investasi langsung di Indonesia, diperlukan perubahan iklim investasi. Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya,

seperti Thailand, Philippina, Vietnam dan Malaysia, iklim investasi di Indonesia masih tertinggal dalam hal menarik minat para investor. Sekalipun demikian, peringkat Indonesia mengenai iklim investasi cenderung mengalami perbaikan dari peringkat 135 dari 175 negara pada tahun 2007 menjadi peringkat 123 dari 178 negara pada tahun 2008 (Doing Business 2008-World Bank Report).

Dewasa ini lembaga yang menangani masalah investasi di daerah seperti halnya BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu) mempunyai peran penting dalam menarik investor, paradigma pembangunan ekonomi dewasa ini dalam usaha menarik para investor dihadapkan dengan permasalahan yang kompleks, yaitu tingkat persaingan yang tinggi, baik yang dilakukan antar negara, antar provinsi atau antar kabupaten/kota dalam suatu negara.

Berdasarkan penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri, Kawasan industri merupakan sarana untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi. Pada dasarnya kawasan industri dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi akitivitas investasi, ekspor, impor dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi.

Dikutip dari media harian Suara Merdeka edisi 20 Desember 2013, yang mana dijelaskan bahwa Jawa Tengah kekurangan kawasan industri, hal

inilah yang menjadikan investor berpikir ulang untuk berinvestasi di Jawa Tengah. Saat ini di Jawa Tengah hanya mempunyai tujuh kawasan industri, enam diantaranya di Semarang, dan satunya di Kabupaten Cilacap. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, maka Pemerintah Jawa Tengah memilih Kabupaten Kendal sebagai kawasan industri. Dalam pelaksanaan pembangunannya pemerintah Kabupaten Kendal menetapkan tiga desa (Mororejo, Sumberejo, dan Wonorejo) yang berada di Kecamatan Kaliwungu sebagai kawasan industri.

Terpilihnya Kecamatan Kaliwungu tak lain karena terletak pada posisi strategis pada ruas jalan pantura dengan topografi memiliki dataran tinggi dibagian Selatan dan juga laut di daerah Utara. Selain itu juga Kecamatan Kaliwungu merupakan daerah penyangga ibu kota Provinsi Jawa Tengah, yang mana berbatasan langsung dengan Kota Semarang, fasilitas penunjang berupa (i) Pelabuhan Kendal dan (ii) Dekat dengan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, (iii) Stasiun kereta dengan jaringan rel aktif (*double track* 123 (iv) Terletak dekat dengan Bandara Internasional Ahmad Yani, dinilai menjadi daya tarik dikembangkannya sebuah kawasan industri.

Menurut Mulyadi dan Monstiska dalam Maramis (2013:9), permasalahan yang sering terjadi pada kawasan industri adalah :

1. Permasalahan lingkungan hidup: mengenai izin pengelolaan limbah yang semakin condong mengikuti perkembangan aturan- aturan yang diciptakan oleh konvensi lingkungan hidup internasional. Permasalahan atas lingkungan hidup ini, akan berpengaruh

terhadap izin usaha industri, izin import bahan baku, serta izin ekspor.

2. Permasalahan tata ruang kawasan industri: memang telah ada peraturan tentang tata ruang, sesuai dengan PP no 24/2009 tentang kawasan industri, namun tetap ada beberapa industri yang didirikan di luar kawasan industri.
3. Permasalahan atas dukungan dan komitmen pemerintah daerah : khususnya tentang hal perizinan dan mekanisme insentif yang menarik bagi investor. Dalam banyak kasus, pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah (perda) yang bertentangan dengan peraturan kawasan industri.
4. Permasalahan energi: dapat berupa kekurangan pada energi listrik maupun gas, yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam kawasan industri.

Selain permasalahan diatas, dalam kawasan industri harus memiliki kondisi fisik, sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi melihat realita di lapangan, pembangunan kawasan industri Kendal belum dapat memenuhi persyaratan dengan baik, minimnya stok lahan yang tersedia di kawasan industri merupakan dampak dari sulitnya pembebasan tanah yang dilakukan oleh pengembang kawasan industri Kendal, dari target awal 2.830 Ha tanah yang akan dikembangkan menjadi kawasan industri, baru 1.100 Ha yang dapat dibebaskan hak kepemilikannya.

Dalam pembangunan kawasan industri Kendal, jaminan atas kejelasan pengembangan kapan akan dilaksanakan menjadi hal yang penting diperhatikan. Rencana peletakan batu pertama yang dilakukan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono di lokasi kawasan industri Kendal yang ditunda sampai dua kali membuat proyek ini menimbulkan persepsi negatif di kalangan para calon investor. peletakan batu pertama yang sedianya akan dilaksanakan pada Mei 2014 ditunda menjadi Juli 2014, akan tetapi pada bulan Juli dengan adanya pemilu legislatif dan pemilu presiden membuat peletakan batu pertama kembali tertunda dan belum jelas kapan akan di resmikan.

Pemerintah Kabupaten Kendal pernah melakukan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mulai diperkenalkan pada tahun 2006. Lokasi pembangunan KEK merupakan tempat yang dibangun menjadi kawasan industri Kendal, akan tetapi pada proses pembangunan KEK tidak dilanjutkan kembali karena minimnya anggaran dan Pemerintah Kabupaten Kendal tidak mampu mendatangkan investor dari luar Jawa Tengah, investor tidak bisa hanya ditawari tenaga kerja yang murah dan kemudahan perizinan apabila lokasi KEK tidak dibangun secara serius (Kompas, 23 Maret 2011). Dengan melihat hal demikian, perlu adanya pembuatan sebuah strategi khusus oleh pemerintah dalam pengembangan kawasan industri Kendal dengan cara membuat iklim investasi yang menarik sehingga menjadi daya tarik sendiri bagi para investor agar mau berinvestasi di kawasan industri.

Faktor penentu daya tarik investasi yang bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi, menurut Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) meliputi Faktor Kelembagaan, Sosial politik, Ekonomi Daerah, Tenaga Kerja dan Infrastruktur Fisik merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan strategi investasi daerah. Pembuatan skala prioritas dalam pembangunan menjadi langkah yang harus dilakukan untuk proyek pembangunan kawasan industri Kendal agar dapat berjalan dengan baik dan efisien.

Dalam penelitian kali ini penulis mengkaji bagaimana strategi yang tepat Pemerintah Kabupaten Kendal dalam pengembangan kawasan industri Kendal. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam pertimbangan menyusun suatu kebijakan pembangunan kawasan industri Kendal serta mengatur strategi-strategi yang paling menguntungkan untuk meningkatkan Investasi tanpa meninggalkan potensi-potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Kendal.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat latar belakang diatas, untuk merumuskan strategi maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor apa yang dominan menjadi penentu daya tarik investasi untuk meningkatkan iklim investasi di Kawasan Industri Kendal?
2. Bagaimana strategi yang tepat untuk mengatasi kendala pengembangan kawasan industri dalam upaya meningkatkan investasi daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi prioritas dalam menentukan daya tarik investasi di Kawasan Industri Kendal serta menentukan strategi yang tepat untuk mengatasi kendala dalam pengembangan Kawasan Industri Kendal dalam upaya meningkatkan investasi daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Bagi pemerintah sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam merancang strategi untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Kendal.
2. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan khususnya di bidang investasi.
3. Bagi kalangan akademis dapat dijadikan bahan penyusunan penelitian yang serupa dan lebih mendalam.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Otonomi Daerah

Menurut Basri (2002:174) hakekat otonomi daerah adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terkuaknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pelaksana otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan

menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Otonomi daerah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal.

Tujuan dari pemberian otonomi daerah sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 32 Tahun 2004 adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Tinjauan Umum Investasi

Menurut Sunariyah (2003:4): “Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang”. Investasi (penanaman modal) adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat (Sadono Sukirno, 1994:107).

Menurut Halim (2005:4) bila dilihat dari jenisnya investasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu investasi riil dan investasi finansial. Investasi riil yaitu investasi terhadap barang-barang tahan lama (barang-barang modal) yang akan digunakan dalam proses produksi berbentuk aset produktif (pendirian pabrik, pembukaan perkebunan, pembukaan pertambangan).

Sedangkan investasi finansial adalah investasi yang dilakukan di pasar modal, investasi finansial umum dilakukan dalam perekonomian modern yang melibatkan kontrak – kontrak tertulis, seperti perdagangan saham dan obligasi

Tujuan investasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Mengacu pada pendapat Tandelilin (2010:7), kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter, yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai saat ini pendapatan masa datang. Ada beberapa alasan mengapa orang melakukan investasi, yaitu:

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. Seorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang.
- b. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau obyek lain, seseorang dapat

menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.

- c. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara maju di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

Sumber dana untuk investasi bisa berasal dari aset-aset yang dimiliki saat ini, pinjaman dari pihak lain, ataupun dari tabungan. Investor yang mengurangi konsumsinya saat ini akan mempunyai kemungkinan kelebihan dana untuk ditabung. Dana yang berasal dari tabungan tersebut jika diinvestasikan akan memberikan harapan peningkatan kemampuan konsumsi investor di masa datang, yang diperoleh dari peningkatan kesejahteraan investor tersebut.

Setiap negara yang ingin mencapai kemajuan seperti yang telah dialami oleh negara maju harus memahami cara-cara yang telah ditempuh oleh negara maju. Setiap negara berkembang akan saling berlomba mendapatkan investor untuk mencapai kemauan yang di idamkan. Beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh investor untuk melakukan investasi di suatu negara adalah stabilitas politik, konsistensi penegakan hukum, sistem dan prospek ekonomi dan keadilan sosial (Mohammad Samsul: 2006:7).

2.1.3 Hubungan Antara Investasi Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Modal sebagai faktor produksi merupakan komponen yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Lincolin Arsyad dalam Kartini Sihombing (2008) pembentukan modal merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi, satu-satunya hambatan pokok yang dapat menghambat terjadinya pembangunan ekonomi yaitu terbatasnya akumulasi modal sehingga diperlukan adanya kucuran modal awal untuk merangsang timbulnya arus domestik yang baru sehingga ketergantungan akan bantuan luar negeri dalam jangka panjang dapat diminimalisir.

Adanya akumulasi modal dapat memungkinkan meningkatnya output dan pendapatan di masa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2004), hal-hal yang memungkinkan terjadinya peningkatan output di masa depan yaitu pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan, dan bahan baku yang meningkatkan stok modal (*capital stock*) fisik suatu negara (yakni total riil neto atas seluruh barang modal produktif secara fisik). Investasi produktif yang bersifat langsung tersebut harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut infrastruktur ekonomi dan sosial seperti pembangunan jalan-jalan raya, penyediaan listrik, persediaan air bersih dan perbaikan sanitasi, pembangunan fasilitas komunikasi, dan sebagainya, yang kesemuanya itu mutlak dibutuhkan dalam rangka menunjang dan mengintegrasikan segenap aktivitas ekonomi produktif.

2.1.4 Faktor Penentu Daya Tarik Investasi

Menurut Komisi Pengawas Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD) (2003:5), faktor yang mempengaruhi daya tarik investasi daerah meliputi faktor kelembagaan, faktor sosial politik, faktor ekonomi daerah, faktor tenaga kerja, dan faktor infrastruktur. Faktor kelembagaan berperan penting dalam menghadapi proyek investasi dan mengoperasikannya, investor cenderung menghadapi berbagai langkah-langkah dimana mereka harus berinteraksi dengan berbagai lembaga pemerintah untuk memperoleh bermacam perizinan yang diperlukan. Seperti halnya kepastian hukum yang jelas serta penegakkan hukum yang adil, aparatur dan pelayanan birokrasi yang baik dan transparan, kebijakan daerah yang mendukung investasi untuk tumbuh, serta keuangan daerah yang tercerminkan melalui PDRB perkapita.

Selain faktor kelembagaan, faktor sosial politik berperan karena berkaitan dengan hubungan sosial politik antar elemen-elemen masyarakat, pemerintah, dan pelaku bisnis di daerah tersebut. Stabilitas sosial politik dan keamanan penting bagi investor karena akan menjamin kelangsungan investasinya untuk jangka panjang. Selain itu, dalam upaya meningkatkan investasi ada empat nilai yang mempengaruhi daya tarik investor terhadap daerah, diantaranya: Keterbukaan masyarakat terhadap investor, tidak ada diskriminasi terhadap investor dalam masyarakat, etos kerja masyarakat yang tinggi serta adat istiadat masyarakat.

Untuk faktor ekonomi daerah, secara alamiah setiap daerah atau wilayah mempunyai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, potensi tersebut tersedia akibat lingkungan alamnya, persoalannya adalah apakah pengambil kebijakan mampu menggali potensi tersebut untuk dikembangkan. Selain potensi ekonomi, struktur ekonomi daerah juga menjadi pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi, struktur ekonomi daerah dapat dilihat melalui analisis jumlah nilai tambah (*value added*) bruto ekonomi daerah tersebut. Kemudian dapat dilihat basis perekonomian dengan kontribusi per sektor dengan nilai tambah seluruh sektor yang tercantum dalam PDRB.

Faktor tenaga kerja berkaitan erat dengan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di daerah tersebut, ketersediaan jumlah tenaga kerja yang besar dapat berarti menambah jumlah tenaga produktif. Dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja diharapkan akan meningkatkan produksi. Tingkat upah minimum yang relatif tidak terlalu tinggi pastinya akan menarik investor untuk berinvestasi, hal ini juga berlaku untuk kebalikannya. Sedangkan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan daya tarik investasi yang cukup penting, Sebabnya adalah teknologi yang dipakai oleh para pengusaha makin lama makin modern. Teknologi modern tersebut menuntut ketrampilan lebih dari tenaga kerja.

Sedangkan untuk faktor infrastruktur berpengaruh terhadap ketersediaan infrastruktur fisik di daerah yang mendukung investor akan menentukan biaya besarnya investasi awal, ketersediaan Infrastruktur fisik

tersebut meliputi sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, *utilitas*, pembuangan limbah dan lain-lain. Sarana dan prasarana transportasi contohnya antara lain : jalan, terminal, pelabuhan, bandar udara dan lain-lain. Sarana dan prasarana telekomunikasi contohnya: jaringan telepon kabel maupun nirkabel, jaringan internet, prasarana dan sarana pos. Sedangkan contoh dari utilitas adalah tersedianya air bersih, listrik dan lain-lain.

Selain ketersediaan infrastruktur, kualitas ini dimaksudkan layak atau tidaknya fasilitas serta infrastruktur itu digunakan, akses terhadap fasilitas dan infrastruktur juga perlu diperhatikan, semakin baik kualitas fasilitas dan infrastruktur dalam bentuk prasarana fisik, maka daya tarik investor terhadap daerah tersebut semakin tinggi.

Dalam melakukan pemeringkatan bobot faktor penentu daya tarik investasi, dalam kondisi normal semestinya bobot yang lebih besar adalah faktor ekonomi daerah, faktor tenaga kerja dan faktor infrastruktur fisik yang menjadi pertimbangan awal dalam menentukan keputusan berinvestasi. Bila faktor kelembagaan dan faktor sosial politik suatu daerah sudah normal, seharusnya dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi faktor utama yang dilihat oleh investor adalah pada faktor ekonomi daerah yang meliputi variabel potensi ekonomi dan variabel struktur ekonomi, serta faktor tenaga kerja dan faktor infrastruktur fisik (KPPOD, 2002:42).

2.1.5 Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebelum menjelaskan tentang perencanaan pembangunan daerah, perlu dipahami terlebih dahulu perencanaan pembangunan. Menurut Riyandi dan Dedy Bratakusumah (2004:6) mengatakan perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksana kegiatan pembangunan (*Action Plan*).

Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area (wilayah) pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik dari suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.

2.1.6 Kawasan Industri

Di negara Indonesia pengertian kawasan industri dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin

usaha kawasan industri. Menurut Marsudi Djojodipuro dalam Pratiknya (2007:74), kawasan industri (*industrial estate*) merupakan sebidang tanah seluas beberapa ratus hektar yang telah dibagi dalam kavling dengan luas yang berbeda sesuai dengan keinginan yang diharapkan pengusaha. Daerah tersebut minimal dilengkapi dengan jalan antar kavling, saluran pembuangan limbah dan gardu listrik yang cukup besar untuk menampung kebutuhan pengusaha yang diharapkan akan berlokasi di tempat tersebut.

2.1.7 Tujuan Pembangunan Kawasan Industri

Tujuan pembangunan kawasan industri secara tegas dapat di simak di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri yang mempunyai tujuan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan, mempercepat pertumbuhan industri di daerah, meningkatkan daya saing industri, meningkatkan daya saing investasi, dan memberikan jaminan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang terkordinasi antar sektor terkait.

Menurut Sadono Sukirno dalam Pratiknya (2007:66) penciptaan kawasan perindustrian ditujukan untuk pembangunan industri di daerah guna mempertinggi daya tarik dari daerah tersebut, dengan harapan akan di peroleh manfaat sebagai berikut : menghemat pengeluaran pemerintah untuk menciptakan prasarana, untuk menciptakan efisiensi yang lebih tinggi dalam kegiatan industri-industri, dan untuk menciptakan

perkembangan daerah yang lebih cepat dan memaksimalkan peran pembangunan daerah dalam keseluruhan pembangunan ekonomi.

Lebih lanjut dikatakan bahwa faktor yang lebih penting lagi yang mendorong usaha menciptakan kawasan perindustrian adalah besarnya keuntungan potensial yang akan diperoleh berbagai industri apabila fasilitas yang demikian disediakan kepada para investor. Oleh sebab itu pengembangan kawasan perindustrian terutama dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak perangsang kepada para investor. Langkah tersebut akan mengurangi masalah untuk menciptakan atau mendapatkan tempat bangunan dan dapat mengurangi biaya yang diperlukan untuk mendirikan industrinya karena bangunan perusahaan dapat disewa atau dibeli dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Selain itu kawasan perindustrian dapat menimbulkan berbagai jenis *external economies* kepada industri-industri tersebut. Dengan demikian adanya pertumbuhan industri dalam kawasan industri dapat mempertinggi efisiensi kegiatan industri tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

2.2.1 “STRATEGI KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK INDONESIA MELALUI PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)” (Studi Efektivitas dan Dampak Sosial Ekonomi Pembentukan KEK di Kabupaten Kendal).

Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Prof. Dr. Ety Soesilowati. M. Si pada tahun 2011 tentang strategi kebijakan peningkatan daya saing

produk indonesia melalui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan studi kasus di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kawasan industri Kendal yang sebelumnya direncanakan sebagai KEK memang merupakan kawasan yang strategis dilihat dari keberadaan jaringan dan keberadaan fasilitas yang ada. Kondisi lahan yang cenderung landai memberikan kemudahan dalam pengembangan yang lebih baik. Dengan asumsi harga lahan Rp. 45.000/m² dan pengurukan lahan tahan sedalam 2 meter dengan biaya Rp. 60.000/m², menyimpulkan bahwa direkomendasikan bahwa proyek tetap diteruskan karena nilai *cashflow* dan *netcashflow* menghasilkan nilai positif serta *benefit cost* yang cukup tinggi yaitu 19 kali.

Sedangkan hal-hal yang direkomendasikan berkaitan dengan pembangunan KEK adalah dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah sebaiknya pemerintah segera membentuk *Public Private Patnership*, pengaturan implementasi dan periode tehnik perlu ditetapkan. Selain itu juga penanganan sosial tenaga kerja dalam masa prakontruksi untuk menjamin kepastian keterlibatan masyarakat mengingat dukungan masyarakat sekitar juga sangat dibutuhkan. Penetapan kebijakan atas manajemen pengelolaan dengan merekrut tenaga profesional serta menyiapkan kelengkapan organisasi dan program kerja yang jelas untuk mendukung terciptanya suatu kawasan ekonomi khusus yang berkualitas baik.

2.2.2 “ANALISIS SEKTOR DAN PRODUK UNGGULAN KABUPATEN KENDAL”

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Evi Yulia Purwanti pada tahun 2008. Peneliti menggunakan enam model pendekatan yaitu analisis *Location Quotient* (LQ), analisis laju pertumbuhan, analisis kontribusi sektoral, analisis Indeks dominasi Sektoral (IDS) dan Indeks Potensi Pengembangan Sektor (IPPS), pendekatan sektoral, dan pendekatan Regional. Pada pendekatan kontribusi sektoral menjelaskan tentang tiga pilar utama pembentuk struktur ekonomi kabupaten Kendal adalah sektor industri pengolahan, pertanian dan perdagangan, hotel dan restoran. Sektor industri pengolahan merupakan sektor andalan dengan kontribusi berkisar 39%, diikuti sektor pertanian yang mampu menyumbang PDRB sekitar 24%. Sedangkan untuk mengetahui sektor basis di kabupaten Kendal pendekatan yang digunakan adalah metode LQ, yang mana menunjukkan sektor basis di Kabupaten Kendal adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air.

Secara umum pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Kendal pertumbuhannya lebih lambat dari pada pertumbuhan sektor yang sama di Jawa Tengah. Hanya ada satu sektor yang secara konsisten menunjukkan pertumbuhan lebih cepat dari periode tiga tahun yaitu sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Demikian juga sektor industri pengolahan menunjukkan kinerja yang semakin baik ditunjukkan

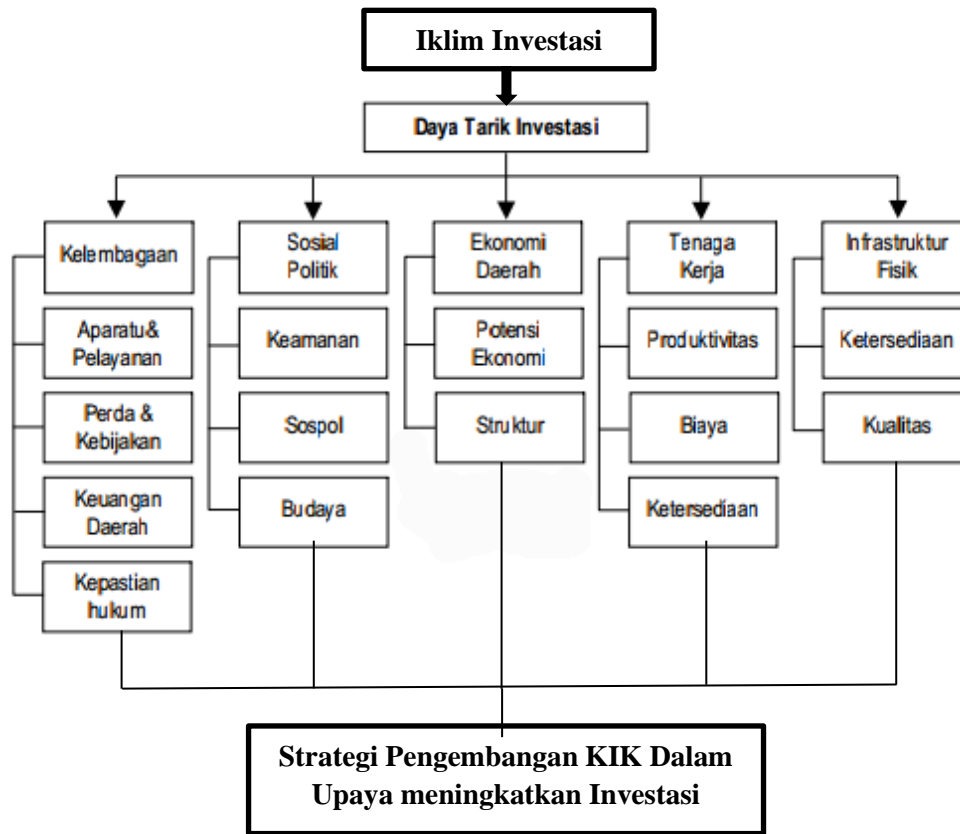
oleh pertumbuhannya yang lebih cepat dibandingkan Jawa Tengah walaupun cenderung mengalami penurunan.

Pada pendekatan sektor unggulan yang potensial untuk dikembangkan adalah sektor pertanian yang masuk pada tingkat klasifikasi satu, merupakan sektor yang termasuk sektor basis dengan nilai LQ rata-rata lebih dari atau sama dengan 1 dan pertumbuhannya cepat. Sedangkan pada sektor industri pengolahan dan Lisrik, gas dan air minum masuk pada klasifikasi dua, yaitu sektor yang termasuk sektor basis dengan nilai LQ rata-rata lebih dari satu atau sama dengan 1, dan pertumbuhannya lambat di Kabupaten Kendal. Hal ini hendaknya mendapat dukungan oleh kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal.

2.3 Kerangka Berpikir

Pembangunan daerah merupakan proses dimana pemerintah daerah dan perusahaan bekerjasama untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya pengembangan kawasan industri untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Kendal maka dibutuhkan iklim investasi yang menarik. Dalam menciptakan iklim investasi yang menarik maka perlu memperhatikan faktor penentu daya tarik investasi yang terdiri dari faktor Kelembagaan, Sosial Politik, Ekonomi Daerah, Tenaga Kerja dan Infrastruktur Fisik.

Berdasarkan landasan teori yang telah diajukan, maka desain penelitian yang akan dilaksanakan dapat digambarkan dalam kerangka teori sebagai berikut.



Gambar.2.1
Gambar Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif pada dasarnya menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antara variabel yang diteliti (Azwar, 2001:5).

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, penelitian ini mendeskripsikan secara rinci dan mendalam tentang strategi pengembangan kawasan industri Kendal dalam upaya meningkatkan investasi daerah. Untuk memahami hal tersebut, perlu diteliti secara mendalam mengenai faktor penentu daya tarik investasi daerah dan bagaimana strategi investasi yang tepat untuk digunakan dalam pengembangan kawasan industri Kendal.

Metode kuantitatif diperoleh dari hasil survei melalui wawancara dan instrumen kuesioner. Metode kuesioner dalam penelitian ini lebih ditunjukkan untuk mengetahui strategi pengembangan investasi dalam upaya pengembangan kawasan industri Kendal.

3.2 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2006:130).

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang berkaitan langsung dalam pengembangan investasi daerah Kabupaten Kendal yang terdiri dari:

- A. Kelompok aparaturnya pemerintah sebanyak 49 orang dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebanyak 19 orang
 - 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 16 orang.
 - 3. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebanyak 14 orang.
- B. Kelompok Pengusaha
 - 1. Dari pihak investor atau penanam modal sebanyak 5 pengusaha

3.3 Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006:131). Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan metode *Purposive Sampling* yang diklasifikasikan berdasarkan *stakeholder* bidang investasi di kabupaten Kendal.

- 1. Kelompok Aparatur Pemerintah, dengan sampel sebanyak 8 yang terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kendal sebanyak 2 orang, terdiri dari :
 - 1. Kabid Ekonomi
 - 2. Kasubid Industri dan Perdagangan

b. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT)

Kabupaten Kendal sebanyak 2 orang, terdiri dari:

1. Kabid Penanaman Modal
2. Kasubbid Promosi dan Kerjasama

c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kendal 4 orang yang

terdiri dari :

1. Kabid Perindustrian
2. Kepala seksi Sarana dan Usaha Industri
3. Kepala seksi Pembinaan Industri
4. Kepala seksi pengawasan dan pengendalian Industri

2. Dari kelompok pengusaha yang berinvestasi di sekitar kawasan industri

Kendal sebanyak 5 orang. (Lihat lampiran)

3.4 Jenis Sumber Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang pengumpulannya dilakukan oleh peneliti sendiri dan data tersebut diperoleh melalui pengamatan langsung oleh peneliti melalui wawancara responden atau informan, dan hasil pengukuran peneliti sendiri. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan sudah diolah. Data sekunder pada penelitian kali ini diperoleh dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kendal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kendal dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal.

3.5 Variabel Penelitian

Dalam suatu penelitian terdapat variabel yang harus ditetapkan dengan jelas sebelum pengumpulan data. Variabel merupakan objek atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel Kelembagaan yang meliputi indikator kepastian hukum, keuangan daerah, kebijakan daerah dan aparatur pemerintah.
2. Variabel Sosial Politik yang meliputi indikator keamanan, sosial politik dan budaya masyarakat.
3. Variabel perekonomian daerah meliputi indikator potensi ekonomi dan struktur ekonomi.
4. Variabel Tenaga Kerja dan Produktivitas meliputi indikator ketersediaan tenaga kerja, biaya tenaga kerja, dan produktivitas tenaga kerja.
5. Variabel Infrastruktur fisik meliputi indikator ketersediaan infrastruktur fisik dan kualitas infrastruktur fisik.

3.6 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang diidenfinisikan, atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Definisi operasional variabel ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Kelembagaan meliputi indikator:
 - a. Kepastian hukum yang diukur melalui konsistensi pemerintah yang mengatur kegiatan usaha di luar birokrasi terhadap kegiatan usaha yang berada di kawasan industri.
 - b. Aparatur dan pelayanan yang diukur melalui tingkat kemudahan birokrasi pelayanan terhadap dunia usaha.
 - c. Keuangan daerah diukur melalui kemampuan pemerintah dalam pengalokasian anggaran belanja daerah untuk pembangunan.
 - d. Kebijakan pemerintah daerah yang diukur melalui tingkat keberhasilan perda yang khususnya berkaitan dengan dunia usaha.
2. Variabel Sosial Politik meliputi indikator:
 - a. Keamanan yang diukur melalui tingkat gangguan keamanan terhadap aktivitas usaha di kawasan industri dan kecepatan aparat keamanan menanggulangi gangguan keamanan
 - b. Sosial politik yang diukur melalui potensi konflik di masyarakat dan intensitas unjuk rasa yang dapat menghambat kegiatan usaha di kawasan industri.
 - c. Budaya masyarakat yang diukur melalui tingkat keterbukaan masyarakat terhadap dunia usaha dan perilaku yang non diskriminasi.
3. Variabel ekonomi daerah meliputi indikator:
 - a. Potensi ekonomi yang diukur melalui PDRB perkapita dan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kendal.

- b. Struktur ekonomi yang diukur melalui nilai tambah sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier melalui rasio PDRB Kabupaten Kendal.
4. Variabel Tenaga Kerja meliputi indikator:
 - a. Ketersediaan tenaga kerja yang diukur melalui ketersediaan tenaga kerja usia produktif dan ketersediaan tenaga kerja pencari kerja.
 - b. Biaya tenaga kerja yang diukur melalui rasio upah yang diterima pekerja.
 - c. Produktivitas tenaga kerja digambarkan melalui kualitas tenaga kerja yang ada dan kontribusinya menghasilkan output dalam proses kegiatan produksi.
 5. Variabel Infrastruktur meliputi indikator:
 - a. Ketersediaan infrastruktur fisik, mengukur ketersediaan fasilitas sebagai penunjang kegiatan produksi di kawasan industri yang meliputi tanah, listrik, akses transportasi dan akses komunikasi.
 - b. Kualitas infrastruktur fisik, mengukur kualitas yang tersedia di kawasan industri sebagai penunjang kegiatan usaha.

3.7 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.7.1 Kuesioner

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan peneliti mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan

karakteristik beberapa pihak utama yang mempunyai peran dibidang tertentu. Kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang informan ketahui. Kuesioner dipakai untuk menyebut metode maupun instrumen. Jadi dalam menggunakan metode angket atau kuesioner instrumen dipakai adalah angket atau kuesioner.

3.7.2 Wawancara

Wawancara atau sering dikenal dengan istilah *interview* atau kuesioner lisan. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara mengenai data tentang variabel, perhatian, sikap terhadap sesuatu (Arikunto, 2006). Dalam pelaksanaan penelitian, penulis melakukan wawancara dengan tujuan untuk mendapatkan data mengenai rencana strategis yang direncanakan.

3.7.3 Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Teknik dokumentasi yaitu “mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya”. Menurut Sugiyono (2008:240) mengemukakan bahwa studi dokumen merupakan peristiwa yang sudah berlaku, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode kuantitatif. Hasil penelitian akan lebih kredibel apabila didukung

oleh foto-foto atau karya tulis akademik, akan tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi.

3.8 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode AHP (Analisis Hirarki Proses). Metode AHP merupakan metode yang diperkenalkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1971 yang menyatakan bahwa AHP adalah suatu model untuk membangun gagasan dan mendefinisikan persoalan dengan cara membuat asumsi-asumsi dan memperoleh pemecahan yang diinginkan. Dalam prosesnya AHP memasukkan pertimbangan dan nilai-nilai pribadi secara logis yang bergantung pada imajinasi, pengalaman dan pengetahuan. Di lain pihak AHP memberi suatu kerangka bagi partisipasi kelompok dalam pengambilan keputusan atau pemecahan masalah.

Metode ini dipandang tepat dalam memecahkan berbagai persoalan yang ingin diketahui karena bersifat fleksibel dalam pemanfaatannya dan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan penelitian. Dalam upaya mendapatkan model penelitian yang signifikan baik dalam disiplin ilmu perencanaan, sosial, ekonomi dan politik, model ini dapat mewakili kepentingan dari berbagai disiplin tersebut dalam konteks penelitian yang ingin dilakukan. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam metode AHP:

1. Menentukan tujuan berdasarkan permasalahan yang ada.

2. Menentukan kriteria yang telah diperoleh dari hasil pra survei dan di diskusikan dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang investasi di Kabupaten Kendal.
3. Menentukan Alternatif yang telah diperoleh dari pra-survei dan diskusi dengan para pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang investasi di Kabupaten Kendal yang dalam hal ini membahas tentang strategi pengembangan kawasan industri Kendal dalam upaya meningkatkan investasi daerah.
4. Menyebarkan kuesioner kepada sejumlah responden.
5. Menyusun pembobotan level dari hasil rata-rata yang didapat dari sejumlah responden tersebut. Kemudian hasil tersebut diolah menggunakan *expert choice versi 9.0*.
6. Menganalisis hasil olahan dari *expert choice* versi 9.0 untuk mengetahui hasil nilai inkonsistensi dan prioritas. Jika nilai konsistensinya lebih dari 0,10 maka hasil tersebut tidak konsisten, namun jika nilai tersebut kurang dari 0,10 maka hasil tersebut dapat dikatakan konsisten. Dan dari hasil tersebut juga dapat diketahui kriteria dan alternatif yang diprioritaskan.
7. Menentukan skala prioritas dari kriteria alternatif untuk mencapai variabel hirarki dengan tujuan strategi pengembangan kawasan industri Kendal dalam upaya meningkatkan investasi daerah.

Untuk menetapkan prioritas elemen-elemen dalam suatu persoalan keputusan adalah dengan membuat perbandingan berpasangan (*Pairwise*

comparison). Setiap elemen dibandingkan berpasangan terhadap suatu kriteria yang ditentukan. Perbandingan menggunakan bilangan yang menggambarkan relatif pentingnya suatu elemen diatas yang lainnya. Skala itu dijelaskan dengan nilai 1-9 yang ditetapkan sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan tingkat hirarki terhadap suatu kriteria yang berada setingkat di atasnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Faktor penentu daya tarik investasi yang paling dominan di kawasan industri Kendal adalah variabel kelembagaan.
2. Strategi yang tepat untuk pengembangan kawasan industri Kendal dalam upaya meningkatkan investasi daerah adalah meningkatkan daya tarik investasi dengan cara melakukan pembangunan digunakan skala prioritas. Berdasarkan hasil penelitian Prioritas yang pertama dalam meningkatkan iklim investasi di kawasan industri Kendal adalah dengan memperbaiki variabel kelembagaan dan variabel sosial politik. Setelah kedua variabel tersebut sudah berjalan dengan normal, selanjutnya memperbaiki variabel infrastruktur fisik, tenaga kerja dan ekonomi daerah.

5.2 Saran

1. Iklim investasi di kawasan industri Kendal dalam keadaan belum normal. Dalam keadaan normal seharusnya faktor penentu daya tarik investasi di kawasan industri Kendal yang mendominasi adalah faktor ekonominya (variabel ekonomi daerah, variabel tenaga kerja, dan variabel infrastruktur

fisik) bukan faktor non-ekonominya (variabel kelembagaan dan variabel sosial politik). Untuk penelitian selanjutnya tentang pengembangan kawasan industri Kendal diharapkan lebih fokus terhadap penyebab dominasi dari faktor non-ekonomi (Variabel kelembagaan dan sosial politik).

2. Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan strategi dalam pengembangan kawasan industri Kendal dengan pembenahan sistem pelayanan yang menyangkut kualitas aparatur pemerintah dalam memberikan kemudahan berinvestasi perlu ditingkatkan. Dalam meningkatkan investasi diperlukan program yang proaktif dalam mempromosikan keunggulan potensi yang ada di kawasan industri Kendal serta mengatur prosedur perizinan yang sederhana dengan mempersingkat waktu proses perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian (suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Azwar, Saifudin. 2001. *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 2013. *Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Kendal*. BPMPT Kendal
- Badan Pusat Statistik Kab Kendal. *Kendal Dalam Angka 2011*. BPS Kendal
- Badan Pusat Statistik Kab. Kendal. *Kendal Dalam Angka 2012*. BPS Kendal
- Badan Pusat Statistik Kab. Kendal. *Kendal Dalam Angka 2013*. BPS Kendal.
- Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. 2005. *Analisi Laporan Keuangan*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Komisi Pelaksana Otonomi Daerah. 2003. *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota persepsi Dunia Usaha*. Jakarta.
- Maramis, Joubert B. 2013. *Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Perekonomian Daerah. Manado*. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi.
- Praktiknya. 2007. *Pengembangan Kawasan Industri Dalam Meningkatkan Investasi di Kota Semarang*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi BNP2TKI. *Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2013*. BNP2TKI Indonesia
- Riyandi. Bratakusumah, Dedy. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Saaty, T. Lorie. 1993. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, Proses Hirarki Analitik Untuk Pengambilan Keputusan Dalam Situasi Yang Kompleks*. Pustaka Binama Pressindo.
- Samsul, Muhammad. 2006. *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, Erlangga.
- Sihombing, Kartini. 2008. *Pengaruh Aglomerasi Modal Tenaga Kerja dan Kepadatan Penduduk Terhadap Petumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak*. Semarang. Fakultas Ekonomi Undip.
- Sugiyono. 2008. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 1994. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Edisi ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunariyah. 2003. *Pengantar pengetahuan pasar modal*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Soesilowaty, Ety.2011. *Strategi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Produk Indonesia Melalui Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*. Artikel Hibah Bersaing. Universitas Negeri Semarang.
- Tandelilin, Eduardus. 2010. *Portofolio dan Invesatasi – Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Kanisius.
- Todaro M.P. Smith C, Stephen. 2004. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Yulia Purwanti, Evi. 2008. *Analisis Sektor dan Produk Unggulan Kabupaten Kendal*. Semarang: FE Undip.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri

Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Industri Kendal.

Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pemberian Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal.

Bulletin/ Media Mapsa

Kompas, 23 Maret 2011

Suara Merdeka, 20 Desember 2013.

No. Responden :
(di isi oleh peneliti)

Analisis Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kendal Dalam Upaya
meningkatkan Investasi Daerah

1. Petunjuk Pengisian

- a. Tulislah Identitas anda pada tempat yang disediakan.
- b. Jawablah pertanyaan berikut dengan yang sebenarnya.
- c. Berilah tanda silang pada jawaban yang anda pilih
- d. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, mohon ditanyakan pada peneliti.

2. Identitas Responden

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Umur :
- d. Pendidikan :
- e. Nama Instansi/Perusahaan :
- f. Jabatan :

Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kendal Dalam Peningkatan Investasi Daerah.

A. Faktor Kelembagaan

1. Kemudahan Seperti apa yang ditunjukkan dalam perizinan oleh birokrasi dan aparat pemda terhadap pelaku usaha di kawasan Industri Kendal?
2. apakah ada kebijakan atau peraturan khusus dalam upaya pengembangan Kawasan Industri Kendal?
3. Penanganan atau tindak lanjut seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap berbagai praktek-praktek pungli yang dilakukan oleh orang/masyarakat di luar birokrasi yang mengganggu kegiatan usaha?
4. Kepastian hukum Seperti apa yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri Kendal?

B. Faktor sosial Politik

1. Gangguan politik Keamanan seperti apa yang dapat menghambat kegiatan usaha di Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana kualitas aparat keamanan dalam mengatasi gangguan keamanan/ketertiban umum, serta jaminan dan perlindungan keamanan yang dapat diberikan oleh aparat keamanan di daerah?
3. Bagaimana potensi hambatan dalam kegiatan usaha yang ditimbulkan oleh konflik sosial di kawasan ekonomi khusus?

4. Seperti apa dan bagaimana daya dukung masyarakat sekitar tempat usaha dilihat dari perlakuannya terhadap orang lain dari luar secara sama tanpa melihat perbedaan yang ada (suku, ras, budaya).

C. Faktor Perekonomian Daerah

1. Bagaimana potensi yang ada di Kawasan Industri Kendal?
2. Struktur ekonomi yang diukur melalui rasio PDRB atas harga berlaku di kabupaten Kendal.

D. Faktor Tenaga Kerja

1. Bagaimana Ketersediaan Tenaga kerja yang ada di kabupaten kendal?
2. Biaya tenaga kerja diukur melalui data UMP dan UMK Daerah di Jawa Tengah Tahun
3. Bagaimana produktivitas para tenaga kerja di kabupaten kendal?

E. Faktor Infrastruktur

1. Bagaimana dukungan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur fisik di Kawasan Industri Kendal?
2. Ketersediaan infrastruktur fisik, mengukur ketersediaan infrastruktur melalui data BPS daerah : Kendal Dalam Angka
3. Kualitas Infrastruktur fisik, mengukur kualitas infrastruktur melalui data BPS Daerah : Kendal Dalam Angka.

**Kuesioner Analysis Hierarchy Process (AHP)
Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kendal Dalam Upaya meningkatkan
Investasi Daerah**

Oleh : Mohammad Misbakhul Munir

Nama Responden :
Jenis Kelamin :
Umur :
Pendidikan :
Instansi/Perusahaan :
Jabatan :

Petunjuk:

Pilihlah satu jawaban yang anda anggap paling sesuai dengan cara menyilang atau melingkari pada huruf jawaban sesuai dengan pendapat anda.

Kriteria:

Adapun kriteria yang dipergunakan dalam kajian mengenai Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kendal Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Daerah adalah sebagai berikut: **Aspek Kelembagaan, Aspek Sosial Politik, Aspek Ekonomi Daerah, Aspek Tenaga Kerja dan Aspek Infrastruktur Fisik.**

Daftar Pertanyaan:

1. Menurut anda seberapa penting **aspek kelembagaan** dibandingkan dengan **Aspek Sosial Politik** dalam pengembangan kawasan Industri Kendal untuk meningkatkan investasi di daerah?
 - a. Keduanya sama penting
 - b. Aspek kelembagaan sedikit lebih penting dibandingkan dengan aspek sosial politik
 - c. Aspek kelembagaan lebih penting dibandingkan dengan aspek sosial politik
 - d. Aspek kelembagaan jelas lebih penting dibandingkan aspek sosial politik
 - e. Aspek kelembagaan mutlak lebih penting dibandingkan semua aspek.
 - f. Aspek sosial politik sedikit lebih penting dibandingkan dengan aspek kelembagaan
 - g. Aspek sosial politik lebih penting dibandingkan dengan aspek kelembagaan
 - h. Aspek sosial politik jelas lebih penting dibandingkan dengan aspek kelembagaan
 - i. Aspek sosial politik mutlak lebih penting dibandingkan semua aspek

Alasan :

2. Menurut anda seberapa penting **aspek kelembagaan** dibandingkan dengan **aspek ekonomi daerah** dalam pengembangan kawasan Industri Kendal untuk meningkatkan investasi di daerah?
- Keduanya sama penting
 - Aspek kelembagaan sedikit lebih penting dibandingkan dengan aspek ekonomi daerah
 - Aspek kelembagaan lebih penting dibandingkan dengan ekonomi daerah
 - Aspek kelembagaan jelas lebih penting dibandingkan aspek ekonomi daerah
 - Aspek kelembagaan mutlak lebih penting dibandingkan semua aspek.
 - Aspek ekonomi daerah sedikit lebih penting dibandingkan dengan aspek kelembagaan
 - Aspek ekonomi daerah lebih penting dibandingkan dengan aspek kelembagaan
 - Aspek ekonomi daerah jelas lebih penting dibandingkan dengan aspek kelembagaan
 - Aspek ekonomi daerah mutlak lebih penting dibandingkan semua aspek

Alasan :

3. Menurut anda seberapa penting **aspek kelembagaan** dibandingkan dengan **aspek Tenaga Kerja** dalam pengembangan kawasan Industri Kendal untuk meningkatkan investasi di daerah?
- Keduanya sama penting
 - Aspek kelembagaan sedikit lebih penting dibandingkan dengan aspek tenaga kerja
 - Aspek kelembagaan lebih penting dibandingkan dengan aspek tenaga kerja
 - Aspek kelembagaan jelas lebih penting dibandingkan aspek tenaga kerja
 - Aspek kelembagaan mutlak lebih penting dibandingkan semua aspek.
 - Aspek tenaga kerja sedikit lebih penting dibandingkan dengan aspek kelembagaan
 - Aspek tenaga kerja lebih penting dibandingkan dengan aspek kelembagaan
 - Aspek tenaga kerja jelas lebih penting dibandingkan dengan aspek kelembagaan
 - Aspek tenaga kerja mutlak lebih penting dibandingkan semua aspek

Alasan:

4. Menurut anda seberapa penting **aspek kelembagaan** dibandingkan dengan **Infrastruktur fisik** dalam pengembangan kawasan Industri Kendal untuk meningkatkan investasi di daerah?
- Keduanya sama penting
 - Aspek kelembagaan sedikit lebih penting dibandingkan dengan aspek infrastruktur
 - Aspek kelembagaan lebih penting dibandingkan dengan aspek infrastruktur
 - Aspek kelembagaan jelas lebih penting dibandingkan aspek infrastruktur
 - Aspek kelembagaan mutlak lebih penting dibandingkan semua aspek.
 - Aspek infrastruktur sedikit lebih penting dibandingkan dengan aspek kelembagaan
 - Aspek infrastruktur lebih penting dibandingkan dengan aspek kelembagaan
 - Aspek infrastruktur jelas lebih penting dibandingkan dengan aspek kelembagaan

- i. Aspek infrastruktur mutlak lebih penting dibandingkan semua aspek

Alasan :

5. Menurut anda seberapa penting **aspek sosial politik** dibandingkan dengan **ekonomi daerah** dalam pengembangan kawasan Industri Kendal untuk meningkatkan investasi di daerah?
- Keduanya sama penting
 - Aspek sosial politik sedikit lebih penting dibandingkan dengan aspek ekonomi daerah
 - Aspek sosial politik lebih penting dibandingkan dengan aspek ekonomi daerah
 - Aspek sosial politik jelas lebih penting dibandingkan aspek ekonomi daerah
 - Aspek sosial politik mutlak lebih penting dibandingkan semua aspek.
 - Aspek ekonomi daerah sedikit lebih penting dibandingkan dengan aspek sosial politik
 - Aspek ekonomi daerah lebih penting dibandingkan dengan aspek sosial politik
 - Aspek ekonomi daerah jelas lebih penting dibandingkan dengan aspek sosial politik
 - Aspek ekonomi daerah mutlak lebih penting dibandingkan semua aspek

Alasan :

6. Menurut anda seberapa penting **aspek sosial politik** dibandingkan dengan **Tenaga Kerja** dalam pengembangan kawasan Industri Kendal untuk meningkatkan investasi di daerah?
- Keduanya sama penting
 - Aspek sosial politik sedikit lebih penting dibandingkan dengan aspek tenaga kerja
 - Aspek sosial politik lebih penting dibandingkan dengan aspek tenaga kerja
 - Aspek sosial politik jelas lebih penting dibandingkan aspek tenaga kerja
 - Aspek sosial politik mutlak lebih penting dibandingkan tenaga kerja
 - Aspek tenaga kerja sedikit lebih penting dibandingkan dengan aspek sosial politik
 - Aspek tenaga kerja lebih penting dibandingkan dengan aspek sosial politik
 - Aspek tenaga kerja jelas lebih penting dibandingkan dengan aspek sosial politik
 - Aspek tenaga kerja mutlak lebih penting dibandingkan semua aspek

Alasan :

7. Menurut anda seberapa penting **aspek sosial politik** dibandingkan dengan **Infrastruktur fisik** dalam pengembangan kawasan Industri Kendal untuk meningkatkan investasi di daerah?
- Keduanya sama penting
 - Aspek sosial politik sedikit lebih penting dibandingkan dengan aspek infrastruktur
 - Aspek sosial politik lebih penting dibandingkan dengan aspek infrastruktur

- d. Aspek sosial politik jelas lebih penting dibandingkan aspek infrastruktur
- e. Aspek sosial politik mutlak lebih penting dibandingkan infrastruktur
- f. Aspek infrastruktur sedikit lebih penting dibandingkan dengan aspek sosial politik
- g. Aspek infrastruktur lebih penting dibandingkan dengan aspek sosial politik
- h. Aspek infrastruktur jelas lebih penting dibandingkan dengan aspek sosial politik
- i. Aspek infrastruktur mutlak lebih penting dibandingkan semua aspek

Alasan :

8. Menurut anda seberapa penting **aspek ekonomi daerah** dibandingkan dengan **Tenaga kerja** dalam pengembangan kawasan Industri Kendal untuk meningkatkan investasi di daerah?

- a. Keduanya sama penting
- b. Aspek ekonomi daerah sedikit lebih penting dibandingkan dengan aspek tenaga kerja
- c. Aspek ekonomi daerah lebih penting dibandingkan dengan aspek tenaga kerja
- d. Aspek ekonomi daerah jelas lebih penting dibandingkan aspek tenaga kerja
- e. Aspek ekonomi daerah mutlak lebih penting dibandingkan tenaga kerja
- f. Aspek tenaga kerja sedikit lebih penting dibandingkan dengan aspek ekonomi daerah
- g. Aspek tenaga kerja lebih penting dibandingkan dengan aspek ekonomi daerah
- h. Aspek tenaga kerja jelas lebih penting dibandingkan dengan aspek ekonomi daerah
- i. Aspek tenaga kerja mutlak lebih penting dibandingkan semua aspek

Alasan :

9. Menurut anda seberapa penting **aspek ekonomi daerah** dibandingkan dengan **Infrastruktur fisik** dalam pengembangan kawasan Industri Kendal untuk meningkatkan investasi di daerah?

- a. Keduanya sama penting
- b. Aspek ekonomi daerah sedikit lebih penting dibandingkan dengan aspek infrastruktur
- c. Aspek ekonomi daerah lebih penting dibandingkan dengan aspek infrastruktur
- d. Aspek ekonomi daerah jelas lebih penting dibandingkan aspek infrastruktur
- e. Aspek ekonomi daerah mutlak lebih penting dibandingkan infrastruktur
- f. Aspek infrastruktur sedikit lebih penting dibandingkan dengan aspek ekonomi daerah
- g. Aspek infrastruktur lebih penting dibandingkan dengan aspek ekonomi daerah
- h. Aspek infrastruktur jelas lebih penting dibandingkan dengan aspek ekonomi daerah
- i. Aspek infrastruktur mutlak lebih penting dibandingkan semua aspek

Alasan :

10. Menurut anda seberapa penting **aspek tenaga kerja** dibandingkan dengan **Infrastruktur fisik** dalam pengembangan kawasan Industri Kendal untuk meningkatkan investasi di daerah?
- a. Keduanya sama penting
 - b. Aspek tenaga kerja sedikit lebih penting dibandingkan dengan aspek infrastruktur
 - c. Aspek tenaga kerja lebih penting dibandingkan dengan aspek infrastruktur
 - d. Aspek tenaga kerja jelas lebih penting dibandingkan aspek infrastruktur
 - e. Aspek tenaga kerja mutlak lebih penting dibandingkan infrastruktur
 - f. Aspek infrastruktur sedikit lebih penting dibandingkan dengan aspek tenaga kerja
 - g. Aspek infrastruktur lebih penting dibandingkan dengan aspek tenaga kerja
 - h. Aspek infrastruktur jelas lebih penting dibandingkan dengan aspek tenaga kerja
 - i. Aspek infrastruktur mutlak lebih penting dibandingkan semua aspek

Alasan

:

Alternatif 1

Untuk mencapai kriteria Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kendal Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Daerah dalam aspek “Kelembagaan” meliputi:

- A. Aparatur dan pelayanan**
- B. Kebijakan dan Peraturan daerah**
- C. Keuangan daerah**
- D. Kepastian hukum**

1. Menurut anda seberapa penting upaya dalam Strategi pengembangan kawasan Industri Kendal untuk meningkatkan investasi di daerah?

melalui **Langkah A dibandingkan B?**

- a. Keduanya sama penting
- b. A sedikit lebih penting dari B
- c. A jelas lebih penting dari B
- d. A jelas lebih penting dari B
- e. A mutlak lebih penting dari alternatif yang ada
- f. B sedikit lebih penting dari A
- g. B jelas lebih penting dari A
- h. B jelas lebih penting dari A
- i. B Mutlak lebih penting dari alternatif yang ada

Alasan :

2. Menurut anda seberapa penting upaya dalam Strategi pengembangan kawasan Industri Kendal untuk meningkatkan investasi di daerah?

melalui **Langkah A dibandingkan C?**

- a. Keduanya sama penting
- b. A sedikit lebih penting dari C
- c. A jelas lebih penting dari C
- d. A jelas lebih penting dari C
- e. A mutlak lebih penting dari alternatif yang ada
- f. C sedikit lebih penting dari A
- g. C jelas lebih penting dari A
- h. C jelas lebih penting dari A
- i. C Mutlak lebih penting dari alternatif yang ada

Alasan :

3. Menurut anda seberapa penting upaya Strategi pengembangan kawasan Industri Kendal untuk meningkatkan investasi di daerah melalui **Langkah A dibandingkan D ?**

- a. Keduanya sama penting
- b. A sedikit lebih penting dari D
- c. A jelas lebih penting dari D
- d. A jelas lebih penting dari D
- e. A mutlak lebih penting dari alternatif yang ada
- f. D sedikit lebih penting dari A
- g. D jelas lebih penting dari A
- h. D jelas lebih penting dari A
- i. D Mutlak lebih penting dari alternatif yang ada

Alasan :

4. Menurut anda seberapa penting upaya Strategi pengembangan kawasan Industri Kendal untuk meningkatkan investasi di daerah melalui **Langkah B dibandingkan C ?**
- a. Keduanya sama penting
 - b. B sedikit lebih penting dari C
 - c. B jelas lebih penting dari C
 - d. B jelas lebih penting dari C
 - e. B mutlak lebih penting dari alternatif yang ada
 - f. C sedikit lebih penting dari B
 - g. C jelas lebih penting dari B
 - h. C jelas lebih penting dari B
 - i. C Mutlak lebih penting dari alternatif yang ada

Alasan :

5. Menurut anda seberapa penting upaya Strategi pengembangan kawasan Industri Kendal untuk meningkatkan investasi di daerah melalui **Langkah B dibandingkan D?**
- a. Keduanya sama penting
 - b. B sedikit lebih penting dari D
 - c. B jelas lebih penting dari D
 - d. B jelas lebih penting dari D
 - e. B mutlak lebih penting dari alternatif yang ada
 - f. D sedikit lebih penting dari B
 - g. D jelas lebih penting dari B
 - h. D jelas lebih penting dari B
 - i. D Mutlak lebih penting dari alternatif yang ada

Alasan :

6. Menurut anda seberapa penting Strategi pengembangan kawasan Industri Kendal untuk meningkatkan investasi di daerah melalui **Langkah C dibandingkan D?**
- Keduanya sama penting
 - C sedikit lebih penting dari D
 - C jelas lebih penting dari D
 - C jelas lebih penting dari D
 - C mutlak lebih penting dari alternatif yang ada
 - D sedikit lebih penting dari C
 - D jelas lebih penting dari C
 - D jelas lebih penting dari C
 - D Mutlak lebih penting dari alternatif yang ada

Alasan :

Alternatif 2

Untuk mencapai kriteria Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kendal Dalam Upaya Peningkatan Investasi Daerah dalam aspek “Sosial Politik” meliputi:

- Keamanan**
- Sosial Politik**
- Budaya**

7. Menurut anda seberapa penting Strategi pengembangan kawasan Industri Kendal untuk meningkatkan investasi di daerah melalui **Langkah A dibandingkan B?**
- Keduanya sama penting
 - A sedikit lebih penting dari B
 - A jelas lebih penting dari B
 - A jelas lebih penting dari B
 - A mutlak lebih penting dari alternatif yang ada
 - B sedikit lebih penting dari A
 - B jelas lebih penting dari A
 - B jelas lebih penting dari A
 - B Mutlak lebih penting dari alternatif yang ada

Alasan :

8. Menurut anda seberapa penting Strategi pengembangan kawasan Industri Kendal untuk meningkatkan investasi di daerah melalui **A dibandingkan C?**
- Keduanya sama penting
 - A sedikit lebih penting dari C
 - A jelas lebih penting dari C

- d. A jelas lebih penting dari C
- e. A mutlak lebih penting dari alternatif yang ada
- f. C sedikit lebih penting dari A
- g. C jelas lebih penting dari A
- h. C jelas lebih penting dari A
- i. C Mutlak lebih penting dari alternatif yang ada

Alasan :

9. Menurut anda seberapa penting Strategi pengembangan kawasan Industri Kendal untuk meningkatkan investasi di daerah melalui **Langkah B dibandingkan C ?**

- a. Keduannya sama penting
- b. B sedikit lebih penting dari C
- c. B jelas lebih penting dari C
- d. B jelas lebih penting dari C
- e. B mutlak lebih penting dari alternatif yang ada
- f. C sedikit lebih penting dari B
- g. C jelas lebih penting dari B
- h. C jelas lebih penting dari B
- i. C Mutlak lebih penting dari alternatif yang ada

Alasan :

Alternatif 3

Untuk mencapai kriteria Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kendal Dalam Upaya Peningkatan Investasi Daerah dalam aspek “Ekonomi Daerah” meliputi:

- A. Potensi Ekonomi
- B. Struktur Ekonomi

10. Menurut anda seberapa penting Strategi pengembangan kawasan Industri Kendal untuk meningkatkan investasi di daerah melalui **Langkah A dibandingkan B?**

- a. Keduannya sama penting
- b. A sedikit lebih penting dari B
- c. A jelas lebih penting dari B
- d. A jelas lebih penting dari B
- e. A mutlak lebih penting dari alternatif yang ada
- f. B sedikit lebih penting dari A
- g. B jelas lebih penting dari A
- h. B jelas lebih penting dari A
- i. B Mutlak lebih penting dari alternatif yang ada

Alasan :

Alternatif 4

Untuk mencapai kriteria Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kendal Dalam Upaya Peningkatan Investasi Daerah dalam aspek “Tenaga Kerja” meliputi:

- A. Ketersedian Tenaga Kerja
- B. Biaya Tenaga Kerja
- C. Produktivitas Tenaga Kerja

11. Menurut anda seberapa penting Strategi pengembangan kawasan Industri Kendal untuk meningkatkan investasi di daerah melalui **Langkah A dibandingkan B?**

- a. Keduanya sama penting
- b. A sedikit lebih penting dari B
- c. A jelas lebih penting dari B
- d. A jelas lebih penting dari B
- e. A mutlak lebih penting dari alternatif yang ada
- f. B sedikit lebih penting dari A
- g. B jelas lebih penting dari A
- h. B jelas lebih penting dari A
- i. B Mutlak lebih penting dari alternatif yang ada

Alasan :

12. Menurut anda seberapa penting Strategi pengembangan kawasan Industri Kendal untuk meningkatkan investasi di daerah melalui **Langkah A dibandingkan C?**

- a. Keduanya sama penting
- b. A sedikit lebih penting dari C
- c. A jelas lebih penting dari C
- d. A jelas lebih penting dari C
- e. A mutlak lebih penting dari alternatif yang ada
- f. C sedikit lebih penting dari A
- g. C jelas lebih penting dari A
- h. C jelas lebih penting dari A
- i. C Mutlak lebih penting dari alternatif yang ada

Alasan :

13.Menurut anda seberapa penting Strategi pengembangan kawasan Industri Kendal untuk meningkatkan investasi di daerah melalui **Langkah B dibandingkan C ?**

- a. Keduannya sama penting
- b. B sedikit lebih penting dari C
- c. B jelas lebih penting dari C
- d. B jelas lebih penting dari C
- e. B mutlak lebih penting dari alternatif yang ada
- f. C sedikit lebih penting dari B
- g. C jelas lebih penting dari B
- h. C jelas lebih penting dari B
- i. C Mutlak lebih penting dari alternatif yang ada

Alasan :

Alternatif 5

Untuk mencapai kriteria Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kendal Dalam Upaya Peningkatan Investasi Daerah dalam aspek “Infrastruktur” meliputi:

- A. Ketersediaan Infrastruktur**
- B. Kualitas Infrastruktur**

14.Menurut anda seberapa penting Strategi pengembangan kawasan Industri Kendal untuk meningkatkan investasi di daerah melalui **Langkah A dibandingkan B?**

- a. Keduannya sama penting
- b. A sedikit lebih penting dari B
- c. A jelas lebih penting dari B
- d. A jelas lebih penting dari B
- e. A mutlak lebih penting dari alternatif yang ada
- f. B sedikit lebih penting dari A
- g. B jelas lebih penting dari A
- h. B jelas lebih penting dari A
- i. B Mutlak lebih penting dari alternatif yang ada

Alasan :

DAFTAR RESPONDEN

No	Kode Informan	Umur	Pendidikan	Instansi
1	R-1	44 Tahun	S1	BPMPT
2	R-2	39 Tahun	S2	BPMPT
3	R-3	54 Tahun	S1	DISPERINDAG
4	R-4	40 Tahun	S1	DISPERINDAG
5	R-5	38 Tahun	S1	DISPERINDAG
6	R-6	43 Tahun	S1	DSIPERINDAG
7	R-7	44 Tahun	S1	BAPEDDA
8	R-8	32 Tahun	S1	BAPEDDA
9	R-9	50 Tahun	S1	Pengusaha
10	R-10	35 Tahun	SMA	Pengusaha
11	R-11	33 Tahun	SMA	Pengusaha
12	R-12	47 Tahun	S1	Pengusaha
13	R-13	35 Tahun	SMA	Pengusaha

Sumber: Data Primer Peneliti, 2014

TABULASI HASIL PENELITIAN

No	Kode responden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		F1:F2	F1:F3	F1:F4	F1:F5	F2:F3	F2:F4	F2:F5	F3:F4	F3:F5	F4:F5
1	R-1	5	7	6	6	6	7	7	1	2	5
2	R-2	6	8	7	7	7	8	6	4	1	5
3	R-3	6	7	9	6	9	7	7	5	2	5
4	R-4	5	6	7	5	7	8	8	4	2	6
5	R-5	6	8	6	5	8	6	6	4	2	6
6	R-6	7	7	7	7	8	7	7	2	1	5
7	R-7	7	9	7	5	6	7	6	4	2	5
8	R-8	5	7	7	4	5	8	6	4	3	4
9	R-9	7	9	6	8	9	7	5	4	2	5
10	R-10	6	7	7	9	7	7	6	4	2	6
11	R-11	5	7	6	6	8	8	7	2	2	5
12	R-12	6	8	7	7	9	7	8	4	2	4
13	R-13	7	8	7	8	8	8	6	5	2	5

Keterangan:

- R = Responden
 F.1 = Faktor Kelembagaan
 F.2 = Faktor Sosial Politik
 F.3 = Faktor Ekonomi Daerah
 F.4 = Faktor Tenaga Kerja
 F.5 = Faktor Infrastruktur

Hasil Penghitungan Tabulasi

No	Faktor	Bobot	Presentase
1	Kelembagaan	348	28%
2	Sosial Politik	316	25.9%
3	Ekonomi Daerah	111	22.1%
4	Tenaga Kerja	186	15%
5	Infrastruktur	275	8.9%

TABULASI HASIL PENELITIAN

No	Kode Responden	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		F1.1:F1.2	F1.1:F1.3	F1.1:F1.4	F1.2:F1.3	F1.2:F1.4	F1.3:F1.4	F2.1:F2.2	F2.1:F2.3	F2.2:F2.3	F3.1:F3.2	F4.1:F4.2	F4.1:F4.3	F4.2:F4.3	F5.1:F5.2
1	R-1	8	7	7	2	3	7	3	6	7	6	2	7	7	6
2	R-2	6	5	7	4	3	8	5	6	8	5	3	8	7	8
3	R-3	8	8	6	4	7	8	5	8	7	7	3	6	6	5
4	R-4	8	5	8	3	6	8	3	7	8	7	2	6	5	5
5	R-5	7	6	6	4	2	8	4	5	7	5	3	6	4	6
6	R-6	7	6	6	3	4	7	4	7	7	6	3	5	6	7
7	R-7	8	6	6	3	5	8	3	7	7	6	7	6	8	5
8	R-8	7	6	6	6	4	6	5	6	6	3	4	7	6	6
9	R-9	8	4	6	5	3	6	4	6	8	8	4	6	5	6
10	R-10	8	4	8	4	5	6	5	5	7	5	4	6	5	6
11	R-11	7	6	6	6	5	7	2	6	7	7	3	6	7	5
12	R-12	8	8	8	4	3	7	2	6	8	7	3	6	6	3
13	R-13	7	8	6	4	5	5	2	6	8	9	5	7	5	5

Keterangan:

Kelembagaan

F 1.1 = Aparatur dan Pelayanan

F 1.2 = Kebijakan dan Perda

F 1.3 = Keuangan Daerah

F 1.4 = Kepastian Hukum

Sosial Politik

F 2.1 = Keamanan

F 2.2 = Kondisi Sosial Politik

F 2.3 = Budaya

Ekonomi Daerah

F 3.1 = Potensi Ekonomi

F 3.2 = Struktur Ekonomi

Tenaga Kerja

F 4.1 = Ketersedian Tenaga Kerja

F 4.2 = Biaya Tenaga Kerja

F 4.3 = Produktivitas Tenaga Kerja

Infrastruktur

F 5.1 = Ketersedian Infrastruktur

F 5.2 = Kualitas Infrastruktur

TABULASI HASIL PENELITIAN

Hasil Penghitungan Bobot Variabel

Variabel	Bobot	presentase
Aparatur dan Pelayanan Pemerintah	262	37.3%
Peraturan Daerah	127	18.1%
Keuangan Daerah	194	27.6%
Kepastian Hukum	119	17%
Sosial Politik	165	47%
Keamanan	128	36.5%
Budaya	58	16.5%
Potensi Ekonomi	81	69.2%
Struktur Ekonomi	36	30.8%
Ketersediaan Tenaga Kerja	128	36.4%
Biaya Tenaga Kerja	148	42.1%
Produktivitas Tenaga Kerja	75	21.3%
Ketersediaan Infrastruktur	66	56.41%
Kualitas Infrastruktur	51	43.58%



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Soekarno - Hatta 193 Kendal Telpn (0294) 381284 Kode Pos 51313
E-mail : kesbangpol@kendalkab.go.id

TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN

Nomor : 070 / 2230 / X / 2014

Telah terima 1 (Satu) bendel surat pemberitahuan untuk mengadakan penelitian/survey atas nama :

- Nama : MOHAMMAD MISBAKHUL MUNIR
- Pekerjaan : Mahasiswa UNNES Semarang
- Alamat : Gedung C – 6 Kampus Sekaran Gunungpati Semarang
- Tujuan : *Mengadakan penelitian dengan judul:*
"STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI KENDAL
DALAM UPAYA MENINGKATKAN INVESTASI DAERAH"
- Lokasi : Bappeda Kab. Kendal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kendal dan BPMPPT Kab. Kendal

Yang bersangkutan telah melaporkan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal, dengan ketentuan :

1. Pemberitahuan Penelitian berlaku untuk masa 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengajuan Pemberitahuan Penelitian;
2. Apabila sampai batas waktu 3 (tiga) bulan, penelitian belum selesai maka wajib untuk mengajukan Perpanjangan Pemberitahuan Penelitian;
3. Setelah Penelitian selesai, Peneliti wajib menyerahkan Laporan Hasil Penelitian ke Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Kendal.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Kendal, 20 Oktober 2014

AN. KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN KENDAL
Kasi Bina Politik dan Hubungan Antar Lembaga





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alamat : Jl Soekarno Hatta No. 191 Kendal ☎ (0294) 381225 Kendal

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070 /2323 R/ Bppd

- I DASAR : Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pelayanan Rekomendasi Penelitian.
- II MEMBACA : Surat dari Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Kendal Nomor : 070/2230/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kendal bertindak atas nama Bupati Kendal menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan penelitian dalam Wilayah Kabupaten Kendal yang dilaksanakan oleh:

- 1 Nama : **Mohammad Misbakhul Munir**
- 2 Pekerjaan : Mahasiswa UNNES Semarang
- 3 Alamat : Kampus, gedung C-6 Kampus Sekaran Gunungpati Semarang
- 4 Penanggung jawab : Drs. Bambang Prishardoyo, M. Si
- 5 Maksud / Tujuan : Mengadakan ijin penelitian dengan Judul "Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kendal dalam Upaya Peningkatan Investasi Daerah "
- 6 Lokasi : Kabupaten Kendal

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah
- b. Sebelum pelaksanaan penelitian langsung kepada masyarakat, maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa Wilayah / Desa / Kelurahan setempat.
- c. Setelah penelitian selesai agar memberitahukan dan menyampaikan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Kendal

III Surat ijin penelitian ini berlaku dari tanggal 20 Oktober 2014 s/d 20 Januari 2015

Dikeluarkan di : K E N D A L
 Pada tanggal : 20 Oktober 2014

a.n. BUPATI KENDAL
 Kepala Bappeda Kab.Kendal
 Ub. Kabid. Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Drs. Jarot Joko Wahyono, MA
 Pembina Tk I

NIP. 19600222 198503 1 010

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alamat : Jl Soekarno Hatta No. 191 Kendal ☎ (0294) 381225 Kendal

Kendal, 20 Oktober 2014

Nomor : 070 / 2323 / Bppd
 Lampiran : 1 (satu) lembar
 Perihal : Pemberitahuan pelaksanaan
 Ijin Penelitian An.
Mohammad Misbakhul M.

Kepada Yth :
 Sdr. 1. Ka. Bappeda Kab. Kendal
 2. Ka. Dinas Perindustrian dan
 Perdagangan Kab. Kendal
 3. Ka. BPMPT Kab. kendal
 di

TEMPAT

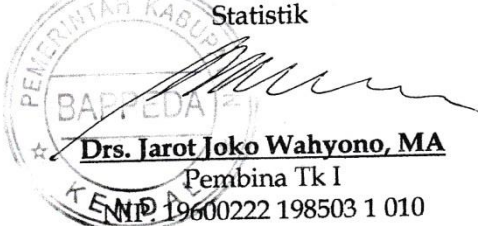
Dengan hormat.

Menunjuk Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Pelayanan Rekomendasi Penelitian dan surat rekomendasi penelitian yang kami keluarkan tanggal 20 oktober 2014 No. 070/ 2323 R/Bppd (terlampir), maka bersama ini kami hadapkan petugas peneliti tersebut.

Diharapkan Saudara bisa memberikan pengertian dan kemudian bimbingan serta bantuan seperlunya.

Atas perhatian saudara kami sampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI KENDAL
 Kepala Bappeda Kab.Kendal
 Ub. Kabid. Penelitian, Pengembangan dan
 Statistik


Drs. Jarot Joko Wahyono, MA
 Pembina Tk I
 NIP. 19600222 198503 1 010

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Taman Makam Pahlawan Kusumajati No. Telp. (0294) 381082 Fax. (0294) 381282
 Kotak Pos 133 KENDAL 51300

Kendal, 28 Oktober 2014.

Nomor : 070/ 699 / Disperindag Kepada :
 Sifat : - Yth. Rektor UNNES Semarang.
 Lampiran : Di -
 Perihal : Ijin Penelitian. **SEMARANG.**

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal nomor 070/2323/Bppd tanggal 20 Oktober 2014 perihal Pemberian Ijin Penelitian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kendal, pada prinsipnya kami mengijinkan kepada :

Nama : **Mohammad Misbakhul Munir.**
 Pekerjaan : Mahasiswa UNNES Semarang.
 Alamat : Kampus, gedung C-6 Kampus Sekaran Gunungpati Semarang.
 Penanggung Jawab : Drs.Bambang Prishardoyo, M.Si
 Maksud/Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan Judul "*Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kendal dalam Upaya Peningkatan Investasi Daerah*".

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Setelah penelitian selesai agar memberitahukan dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kendal.

Surat ijin Penelitian ini berlaku dari tanggal 15 Oktober 2014 s/d 20 Januari 2015.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

KEPALA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN KENDAL

Drs. MSUKRON SAMSUL HADI, M.Si

Pembina Utama Muda
 NIP. 19651119 199403 1 007

Tembusan: disampaikan Kepada Yth ;

1. Kepala BAPPEDA Kab.Kendal (sebagai laporan);



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Taman Makam Pahlawan Kusumajati No. Telp. (0294) 381082 Fax. (0294) 381282
Kotak Pos 133 KENDAL 51300

Kendal, 28 Oktober 2014.

Nomor : 070/ 699 / Disperindag Kepada :
Sifat : - Yth. Rektor UNNES Semarang.
Lampiran : Di -
Perihal : Ijin Penelitian. **SEMARANG.**

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal nomor 070/2323/Bppd tanggal 20 Oktober 2014 perihal Pemberian Ijin Penelitian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kendal, pada prinsipnya kami mengijinkan kepada :

Nama : **Mohammad Misbakhul Munir.**
Pekerjaan : Mahasiswa UNNES Semarang.
Alamat : Kampus, gedung C-6 Kampus Sekaran Gunungpati Semarang.
Penanggung Jawab : Drs.Bambang Prishardoyo, M.Si
Maksud/Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan Judul "***Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kendal dalam Upaya Peningkatan Investasi Daerah***".

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Setelah penelitian selesai agar memberitahukan dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kendal.

Surat ijin Penelitian ini berlaku dari tanggal 15 Oktober 2014 s/d 20 Januari 2015.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KENDAL

Drs. M. SUKRON SAMSUL HADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651119 199403 1 007

Tembusan: disampaikan Kepada Yth ;

1. Kepala BAPPEDA Kab.Kendal (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan (Mohammad Misbakhul Munir);



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
FAKULTAS EKONOMI (FE)**

Alamat: Gedung C-6, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang,
Telepon(Fax.) 8508015
e-mail : fe@unnes.ac.id

Nomor : 1253/UN37.1.7/PP/2014

8 Oktober 2014

Lam. : -

Hal. : **Permohonan Ijin Penelitian**

Yth. Pimpinan PT. Istana Beton Modern

Kecamatan Kaliwungu

Kabupaten Kendal

Diberitahukan dengan hormat bahwa, mahasiswa kami:

Nama : **MOHAMMAD MISBAKHUL MUNIR**

N I M : 7111410049

Jurusan/Prodi : Ekonomi Pembangunan / S1

Semester : IX (Sembilan)

Alamat : Weleri, Kendal

akan menyusun skripsi dengan judul : " Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kendal Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Daerah ".

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya agar mahasiswa yang bersangkutan dapat diijinkan untuk melakukan Penelitian di PT. Istana Beton Modern, dengan alokasi waktu bulan **Oktober s.d Desember 2014**.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih



an. Dekan.

Pembantu Dekan Bid. Mawa.,

Bambang Prishardoyo, M.Si

NIP. 196702071992031001

Tembusan :

1.Pembantu Dekan Bid.Akademik

2.Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi Unnes

FM-05-AKD-24

